



EFEKTIVITAS SANKSI PBB TERHADAP KOREA UTARA

Rizki Roza*)

Abstrak

Korea Utara mengumumkan keberhasilannya melakukan uji coba bom hidrogen yang memiliki daya ledak lima kali lipat dari bom atom yang pernah dijatuhkan di Nagasaki, Jepang. Merespons tindakan tersebut, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berhasil menyepakati dengan suara bulat sebuah resolusi baru yang menjatuhkan sanksi lebih berat terhadap Korut. Sanksi tersebut merupakan sanksi yang paling keras yang pernah dijatuhkan terhadap Korut. Ketergantungan Korut terhadap hubungan ekonomi dengan China dan Rusia, menempatkan komitmen kedua negara tersebut untuk turut menerapkan sanksi sebagai faktor yang paling menentukan efektivitas sanksi PBB terhadap Korut. Meskipun Indonesia tidak memiliki cukup pengaruh untuk secara langsung menekan Korut melalui penerapan sanksi PBB, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan Indonesia demi menjaga komitmen China dan Rusia dalam menerapkan sanksi PBB terhadap Korut.

Pendahuluan

Pada 3 September lalu, Korea Utara (Korut) mengumumkan keberhasilannya dalam uji coba peledakan bom hidrogen. Korut menyatakan telah berhasil membuat bom hidrogen yang dapat dimasukkan ke dalam rudal balistik antar benua (*intercontinental ballistic missile/ICBM*). Bom tersebut menjadi senjata nuklir terkuat yang pernah diciptakan. Uji coba kali ini menghasilkan daya ledak setara 100 kiloton TNT, lima kali lipat kekuatan bom atom yang pernah dijatuhkan di Nagasaki, Jepang. Uji coba ini merupakan yang keenam sejak pertama kali dilakukan pada tahun 2006 dan menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan pengembangan senjata nuklir Korut.

Uji coba tersebut memicu kecaman dan kemarahan masyarakat internasional. Untuk merespons tindakan Korut tersebut, dengan dorongan Amerika Serikat (AS), pada 11 September Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat menyepakati sebuah resolusi yang menjatuhkan sanksi baru terhadap Korut. Ini merupakan paket sanksi ke sembilan yang telah dijatuhkan DK PBB terhadap Korut sejak tahun 2006 terkait program senjata nuklir dan rudal Korut. Tulisan singkat ini berupaya memberikan gambaran bagaimana efektivitas sanksi baru tersebut, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: rizki.roza@dpr.go.id



gambaran ini, dapat dikaji peran apa yang bisa dijalankan Indonesia saat ini untuk membantu penyelesaian krisis Semenanjung Korea.

Sanksi terhadap Korea Utara

Meskipun Piagam PBB tidak mendefinisikan sanksi, namun sudah ada kesepahaman bahwa sanksi merupakan penerapan pembatasan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan negara, barang dan jasa atau orang dan entitas tertentu. Penerapan sanksi diarahkan untuk menjaga atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. Tanpa melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata, sanksi dimaksudkan untuk membatasi akses terhadap suatu barang atau jasa tertentu yang menjadi perhatian internasional; mengubah perilaku sebuah negara, dan menghukum sebuah negara.

Terhadap Korut, terkait dengan program nuklir dan rudal balistiknya, sejak 2006 DK PBB telah mengeluarkan sembilan resolusi yang menjatuhkan sanksi terhadap Korut. Sanksi-sanksi tersebut dijatuhkan DK PBB untuk memaksa Korut menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya. Sejumlah sanksi ekonomi telah diterapkan untuk melumpuhkan kemampuan Korut mendanai dan melanjutkan program nuklirnya. Secara unilateral, AS bahkan telah menerapkan sanksi yang jauh lebih ketat. Namun pada kenyataannya, Korut masih memiliki kemampuan dan dukungan dana untuk memacu program pengembangan senjata nuklir dan rudalnya. Merujuk pada sejumlah uji coba yang dilakukan Korut selama masa pemerintahan Presiden Kim Jong Un, perkembangan penguasaan teknologi nuklir dan rudal Korut justru dapat dikatakan berlangsung jauh lebih pesat dibanding era pemerintahan ayahnya.

Pada 11 September, DK PBB kembali menjatuhkan sanksi baru guna merespons uji coba bom hidrogen yang dilakukan Korut pada 3 September. Sanksi baru tersebut mencakup pembatasan suplai bahan bakar minyak ke Korut dan larangan ekspor tekstil. Sanksi baru ini menjadi sanksi yang paling keras yang pernah dijatuhkan terhadap Korut. Diperkirakan sanksi baru akan memangkas ekspor Korut sebesar 90%. Tekstil merupakan ekspor terbesar Korut yang kedua setelah batu bara dan mineral lainnya. Larangan ekspor tekstil akan menyebabkan Korut mengalami kerugian hingga 726 juta dollar AS atau Rp 9,3 triliun per tahun. Sanksi ini diharapkan dapat membuat Korut kehabisan bahan bakar dan

memutus sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mendanai program senjata nuklir dan rudal Korut.

Arti penting resolusi baru ini tidak hanya pada kerasnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi adanya dukungan China dan Rusia terhadap penerapan sanksi tersebut. Sebelumnya, China dan Rusia berulang kali menyatakan bahwa upaya penambahan sanksi akan menjadi kontraproduktif bagi penyelesaian krisis di Semenanjung Korea. Misalnya pada Agustus lalu, saat Jepang, AS dan Inggris menyerukan sanksi baru terhadap Korut terkait peluncuran rudal yang melintasi wilayah udara Jepang, China mengemukakan ide tersebut. Namun kini, setelah melalui negosiasi antara negara-negara anggota DK PBB, sejumlah sanksi baru berhasil disepakati untuk dijatuhkan pada Korut dan memperoleh dukungan China dan Rusia.

Keberhasilan tercapainya resolusi tersebut dapat dilihat sebagai babak baru penyelesaian krisis Semenanjung Korea. Tindakan-tindakan Korut telah melahirkan ancaman nyata, tidak hanya bagi perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan, tetapi global. Kondisi ini yang memungkinkan masyarakat internasional sampai pada satu kesamaan sikap. Dengan kondisi demikian, sepatutnya seluruh masyarakat internasional, termasuk Indonesia, berupaya untuk berkontribusi dalam memastikan terlaksananya sanksi-sanksi DK PBB sehingga berhasil memaksa Korut menghentikan program senjata nuklirnya dan kembali ke meja perundingan.

Efektivitas Sanksi DK PBB

Sanksi baru yang dijatuhkan DK PBB terhadap Korut merupakan inisiatif AS. Pada awalnya, AS mengusulkan untuk menjatuhkan sanksi yang sangat keras terhadap Korut. AS mengusulkan pemberlakuan embargo minyak yang ketat, pembekuan aset pribadi Kim Jong Un, larangan ekspor industri tekstil, larangan perjalanan terhadap Kim Jong Un dan pejabat senior, serta sanksi-sanksi baru lainnya. Menurut Menlu AS, Rusia dapat memulangkan ribuan pekerja Korut untuk menambahkan tekanan ke rejim Kim Jong Un. Tercatat 30.000 pekerja Korut di Rusia turut menyumbang devisa yang signifikan.

Setelah melalui negosiasi, AS merubah sikapnya. Perubahan sikap AS tersebut dilakukan guna merangkul dukungan dari China dan Rusia. Mengapa dukungan China dan Rusia menjadi begitu penting bagi penjatuhan

sanksi terhadap Korut? Sikap melunak AS cukup menggambarkan arti penting dukungan China dan Rusia atas sanksi yang akan dijatuhkan ke Korut. Selama ini, hubungan ekonomi dengan China dan Rusia memiliki arti penting bagi Korut untuk bertahan di bawah tekanan dan isolasi masyarakat internasional. Bagi Korut, China merupakan mitra dagang paling penting dan sumber pendapatan utama. Korut sangat mengandalkan China untuk memenuhi kebutuhan bahan bakarnya. Larangan ekspor tekstil, yang merupakan ekspor kedua terbesar Korut setelah batu bara dan mineral lainnya akan berdampak besar bagi perekonomiannya. China merupakan tujuan dari 80% ekspor tekstil Korut. Jika diterapkan dengan efektif, sanksi ekonomi ini akan menyebabkan Korut kehilangan sumber pendapatan yang sangat besar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas sanksi DK PBB untuk membatasi kemampuan Korut menjalankan program pengembangan senjata nuklir dan rudalnya sangat bergantung pada sejauh mana China dan Rusia berkomitmen untuk turut menerapkan sanksi-sanksi yang sudah disepakati bersama.

Peran Indonesia

Indonesia senantiasa mendukung langkah masyarakat internasional dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir yang menekankan pentingnya multilateralisme dan dilakukan berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan di bawah kerangka PBB. Dengan posisi dasar ini, berarti Indonesia semestinya turut berkontribusi dalam menerapkan sanksi-sanksi DK PBB terhadap Korut. Namun, dengan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korut saat ini, Indonesia tidak memiliki kemampuan signifikan untuk memberi tekanan-tekanan ekonomi terhadap Korut.

Mengetahui pentingnya komitmen China dan Rusia demi efektivitas sanksi DK PBB, setidaknya Indonesia dapat berkontribusi dalam menjaga komitmen kedua negara tersebut. Untuk itu, Indonesia perlu mencermati faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi komitmen kedua negara tersebut. Merujuk pada pernyataan-pernyataan pemimpin dan pejabat kedua negara terkait krisis di Semenanjung Korea, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Indonesia, antara lain:

Pertama, pendekatan Presiden Korsel yang mengedepankan dialog dalam mengelola hubungannya dengan Korut sebagaimana

disampaikan pada awal masa pemerintahan, telah mendapat dukungan China. Denuklirisasi Pyongyang merupakan pandangan dasar Presiden Korsel, dan pemimpin China sepakat bahwa itu merupakan tujuan bersama mereka. Presiden Moon menegaskan bahwa ia tidak menginginkan perang kembali melanda Semenanjung Korea. Dengan posisi tersebut, Presiden Moon dipandang sebagai salah satu harapan yang dimiliki Semenanjung Korea agar terhindar dari perang. Selama Pemerintahan Presiden Moon konsisten dengan pendekatannya tersebut, tampaknya China dan Rusia akan terus mendukung dan berkomitmen membantu mendesak Korut untuk melucuti program nuklirnya dan kembali ke meja perundingan.

Kedua, Rusia dan China mengkhawatirkan perang retorika antara pemimpin Korut dan AS dapat menjauhkan kemungkinan proses dialog. China dan Rusia berulang kali mengingatkan pemimpin Korut dan AS untuk menenangkan diri dan menghindari pernyataan-pernyataan provokatif agar tidak memperburuk situasi. Salah satu pernyataan Trump dalam Sidang Umum PBB pada 19 September, bahkan dipandang Korut sebagai pernyataan perang. Pernyataan-pernyataan Trump yang menyerang pribadi pemimpin Korut juga dapat mendorong kedua negara semakin dekat dengan potensi peperangan. Meskipun sebagian pihak masih meyakini kemungkinan pecahnya perang masih kecil, potensi terjadinya insiden sangat mungkin.

Ketiga, peningkatan kerja sama militer AS dan Korsel menimbulkan kekhawatiran China. Tekanan-tekanan militer terhadap Korut, baik melalui latihan militer bersama, kerja sama sistem pertahanan rudal, maupun kesepakatan penjualan sistem persenjataan antara AS dan Korsel tidak hanya menjadi ancaman bagi Korut, tapi juga menimbulkan rasa tidak aman bagi China. Tindakan-tindakan tersebut dikhawatirkan dapat mengendurkan komitmen dari kedua negara penting tersebut, Rusia dan China.

Sebagai contoh, pada awal September, Trump memberi persetujuan peningkatan kapasitas peluru kendali Korsel demi mengimbangi Korut. Kedua presiden bersepakat untuk melonggarkan batasan kemampuan rudal balistik Korsel. Korsel yang selama ini, berdasarkan kesepakatan kedua negara, dibatasi kemampuan rudalnya dengan jangkauan maksimum 800 km dengan muatan 500 kilogram, kemungkinan akan diizinkan memiliki rudal dengan kemampuan membawa hulu ledak

hingga satu ton. Batasan ini awalnya ditetapkan AS untuk menghindari terjadinya perlombaan senjata di kawasan. Dengan jangkauan tersebut, rudal Korsel akan mampu menjangkau fasilitas militer Korut, demikian pula wilayah China dan Jepang. Meskipun AS dan Korsel mengklaim bahwa kerjasama pertahanan rudal antara mereka diarahkan hanya untuk merespons ancaman Korut, kehadiran sistem pertahanan rudal AS di Korsel akan melemahkan kemampuan pertahanan militer China.

Dengan memperhatikan ketiga hal di atas, pemerintah Indonesia maupun DPR perlu memanfaatkan berbagai aset diplomatiknya melalui berbagai forum bilateral, regional, maupun multilateral, untuk mendorong Pemerintahan Presiden Moon Jae-In agar tetap konsisten dengan pendekatannya yang mengutamakan dialog dalam menghadapi Korut; mengingatkan pemimpin Korut dan AS untuk menenangkan diri dan menghindari pernyataan-pernyataan yang provokatif dan menyerang pribadi; serta mengingatkan Korsel untuk menghindari kebijakan yang menimbulkan rasa tidak aman bagi China ataupun Rusia.

Penutup

Penerapan sanksi merupakan salah satu jalan damai, yang menghindarkan penggunaan kekuatan militer, untuk merubah perilaku suatu negara. Program pengembangan nuklir dan rudal Korut merupakan ancaman nyata bagi perdamaian dan keamanan dunia, tidak hanya bagi kawasan Semenanjung Korea, tetapi juga bagi seluruh dunia. Sanksi terbaru DK PBB terhadap Korut dapat dilihat sebagai babak baru penyelesaian krisis Semenanjung Korea karena merupakan sanksi yang paling keras yang pernah dijatuhkan terhadap Korut, dan memperoleh dukungan China dan Rusia yang selama ini menolak penambahan sanksi. Ketergantungan Korut terhadap hubungan ekonomi dengan Rusia dan China, menempatkan komitmen kedua negara tersebut untuk turut menerapkan sanksi sebagai faktor yang paling menentukan efektivitas sanksi DK PBB terhadap Korut.

Dengan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korut saat ini, Indonesia tidak memiliki kemampuan signifikan untuk memberi tekanan-tekanan ekonomi terhadap Korut. Yang perlu dilakukan Indonesia adalah turut menjaga komitmen Rusia dan China terhadap resolusi yang telah mereka sepakati bersama di DK PBB.

Selain itu, DPR perlu mendorong Pemerintah Indonesia untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang dapat membantu mengembalikan kedua negara yang bersengketa untuk kembali ke meja perundingan. Dari sedikit negara yang memiliki hubungan baik dengan Korut, Indonesia termasuk salah satu di antaranya. Kedekatan Presiden Soekarno dengan pemimpin Korut Kim Il Sung menjadi pondasi penting sejarah panjang hubungan kedua negara. Ini merupakan aset penting untuk mendekati kedua negara yang bersengketa.

Referensi

- “After U.S. Compromise, Security Council Strengthens North Korea Sanctions”, <https://www.nytimes.com/2017/09/11/world/asia/us-security-council-north-korea.html> , diakses 24 September 2017.
- “Bank-Bank Besar di China Mulai Hentikan Transaksi dengan Warga Korut”, <http://internasional.kompas.com/read/2017/09/12/17382201/bank-bank-besar-di-china-mulai-hentikan-transaksi-dengan-warga-korut>, diakses 24 September 2017.
- “China: Korean Peninsula Crisis Is Not Our Responsibility”, <http://thediplomat.com/2017/07/china-korean-peninsula-crisis-is-not-our-responsibility/>, diakses 24 September 2017.
- “North Korea Claims it has Detonated Hydrogen Bomb in Most Powerful Nuclear Test to Date”, <http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/tremor-of-56-magnitude-strikes-in-north-korea-usgs>, diakses 24 September 2017.
- “North Korea Sanctions: UN Security Council Unanimously Agrees New Measures”, <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/12/north-korea-sanctions-un-security-council-unanimously-agrees-new-measures>, diakses 24 September 2017.
- “Presiden Baru Korsel Tunjukkan Komitmen Menjaga Perdamaian”, <http://www.beritasatu.com/asia/448471-presiden-baru-korsel-tunjukkan-komitmen-menjaga-perdamaian.html>, diakses 24 September 2017.
- “Tersinggung oleh Ledekan Rocket Man, Kim Jong Un Tak Kan Menyerah”, <http://internasional.kompas.com/read/2017/09/26/14300011/tersinggung-oleh-ledekan-rocket-man-kim-jong-un-takkan-menyerah>, diakses 24 September 2017.